

## AGAMA DAN HAK MILIK SEBAGAI SPIRIT PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA DALAM PERANG DIPONEGORO

**Faiq Tobroni**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
*faiq.tobroni@uin-suka.ac.id*

**Fatma Amilia**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
*fatma.amilia@uin-suka.ac.id*

### *Abstract*

*The causes of the Diponegoro War or the Java War often get a disproportionate reading. Amongst are the assumptions that interpret the war as Diponegoro's struggle to protect his personal interests (land security) or also the presumption that saw the war to establish an Islamic state. This assumption turned out to be very contradictory to the process of the war. In the war that occurred for five years (1825-1830 AD), it turned out that the backbone of the Diponegoro army was ordinary people (not the army of the Ngayogyakarta Palace). This fact suggests that the war was a universal people's defense consisting of several layers of society (santri, jawara, nobility, etc.). This fact undermines the assumption that the cause of war is religious exclusivism and the interests of Diponegoro's personal property. By conducting library research through reading the Volume 1-4 of the Diponegoro Chronicle of Manado and other relevant main works, the researcher found that the causes of the war included the struggle to defend the honor of religion and the state which was symbolized in the public interest. The religious aspect is aimed at the spirit of sub-fertilizing religious elements in the form of resistance to tyrannical actions*

---

*and the practice of immorality. The public interest is addressed by the spirit of struggle for the property right that is transformed into a spirit of resistance to extortion with an offer of prosperity. The land conflict and the demolition of Diponegoro's residence in Tegalrejo became a symbol of the seizure of property rights which had actually been in the form of extortion to the people in the name of taxes. The feeling of the same boat aroused awareness of ordinary people, santri, jawara and Diponegoro supporters to fight together (universal people's struggle).*

**Keywords:** *Diponegoro War, Religion, Property Rights, Universal People's Strugels.*

### **Abstrak**

*Penyebab Perang Diponegoro atau Perang Jawa sering mendapatkan pembacaan yang kurang proporsional. Di antaranya anggapan yang memaknai peperangan tersebut sebagai perjuangan Diponegoro menjaga kepentingan pribadinya (pengamanan lahan) atau juga anggapan yang melihat peperangan tersebut untuk mendirikan negara Islam. Anggapan ini ternyata sangat kontradiktif dengan pelaksanaan perang tersebut. Dalam peperangan yang terjadi selama lima tahun (1825-1830 M) tersebut, ternyata tulang punggung pasukan Diponegoro adalah rakyat biasa (bukan tentara Keraton Ngayogyakarta). Fakta ini mengisyaratkan bahwa peperangan tersebut merupakan perlawanan rakyat semesta yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat (santri, jawara, bangsawan, dst). Fakta inilah yang meruntuhkan anggapan penyebab perang adalah eksklusivisme keagamaan maupun kepentingan pribadi pribadi Diponegoro. Dengan melakukan penelitian kepustakaan melalui pembacaan Babad Diponegoro Versi Manado Jilid 1-4 dan karya utama lain yang relevan, peneliti menemukan bahwa penyebab peperangan tersebut di antaranya adalah perjuangan membela kehormatan agama maupun negara yang disimbolisasikan dalam kepentingan umum. Aspek agama ditujukan dengan semangat mensubstansialisasikan unsur agama berupa perlawanan atas tindakan kezhaliman dan praktek amoralitas. Kepentingan umum ditujukan dengan spirit perjuangan atas hak milik yang bertransformasi menjadi semangat perlawanan atas pemerasan dengan tawaran kemakmuran. Konflik lahan dan pembumi-hangusan kediaman Diponegoro di Tegalrejo menjadi simbol perampasan hak milik yang sebenarnya telah berlaku dalam bentuk pemerasan kepada rakyat atas nama pajak.*

*Perasaan senasib ini membangkitkan kesadaran rakyat biasa, santri, jawara dan bangsawan jaringan Diponegoro untuk melakukan perlawanan bersama (perlawanan rakyat semesta).*

**Kata Kunci:** Perang Diponegoro, Agama, Hak Milik, Perjuangan Rakyat.

## A. PENDAHULUAN

Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan salah satu peperangan yang sangat melegenda dalam perjuangan rakyat di nusantara untuk melawan penjajahan Belanda. Atas perjuangannya, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Diponegoro sebagai salah satu pahlawan nasional. Pengakuan atas Diponegoro juga mendapatkan penguat dari dunia internasional yang ditunjukkan dengan pengakuan Unesco atas Babad Diponegoro (catatan pribadi kehidupan Diponegoro) sebagai warisan dunia.<sup>1</sup>

Di balik kegemilangan perjuangan Diponegoro, akan tetapi masih sering ditemui masalah proporsionalitas dalam menarasikan penggambaran penyebab terjadinya peperangan. Masalah proporsionalitas dalam menilai motivasi peperangan terlihat dengan pandangan yang menilai seolah penyebab peperangan adalah kepentingan individu Diponegoro. Sebaliknya, ada pula yang melihat motivasi perang adalah semangat eksklusivisme agama Diponegoro. Pandangan yang pertama bisa direnungkan dari tesis yang menganggap keputusan Diponegoro memobilisasi pasukannya untuk melawan Belanda berdasarkan motivasi untuk melindungi tanah pekarangannya. Pandangan kedua bisa direnungkan dari kesimpulan yang menganggap bahwa Perang Diponegoro bertujuan mendirikan negara Islam.

Celaknya tesis peperangan karena pekarangan inilah yang juga digunakan dalam penyampaian materi ke-Diponegoro-an di bangku sekolah dasar sampai menengah. Di antara buku paket sekolah yang membangun tesis demikian adalah Ilmu Pengetahuan Sosial untuk

---

<sup>1</sup> *Memory of The World Register. 2012-49. Babad Diponegoro or Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro (1785-1855). A Javanese nobleman, Indonesian national hero and Pan-Islamist. (Indonesia and The Netherlands).*

MI/SD Kelas 5 yang ditulis oleh Endang Susilaningih,<sup>2</sup> Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII yang ditulis oleh Anwar Kurnia<sup>3</sup>, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII yang ditulis oleh Mukminan dan Endang Mulyani<sup>4</sup>, dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MA/MAK/SMA/MAK Kelas XI yang ditulis oleh Sardiman AM dan Amurwani<sup>5</sup>. Di sisi lain, terdapat karya yang menilai motivasi Perang Diponegoro adalah mendirikan negara Islam. Di antara karya tersebut adalah *Negara Islam Tanah Jawa; Cita-Cita Jibadis Diponegoro* yang ditulis K. Mustarom. Menurutnya, Perang Diponegoro merupakan salah satu representasi tekad Diponegoro untuk mendirikan negara Islam.<sup>6</sup>

Beberapa problematika dalam membaca penyebab Perang Diponegoro mendorong perlunya ada pembacaan yang proporsional dengan menggali sumber yang terpercaya dan dengan perpektif yang kontekstual pula. Pandangan yang menganggap motivasi perang sebagai kepentingan pribadi Diponegoro atau pun keinginan mendirikan negara Islam terasa tidak proporsional jika melihat pelaksanaan perang. Dalam perang tersebut, jika hanya masalah kepentingan pribadi, mungkin terasa sulit bagi Diponegoro menggalang kekuatan rakyat dari segala lapisan (kekuatan rakyat semesta) selama peperangan dalam kurun waktu lima tahun. Fakta itu pula yang terasa kontradiktif jika dikatakan peperangan ini untuk mendirikan negara Islam. Jika tujuannya untuk mendirikan negara Islam, rasanya Diponegoro akan kesulitan menghimpun kekuatan rakyat semesta yang terdiri dari segala macam

---

<sup>2</sup> Endang Susilaningih, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI/SD Kelas 5* (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, 2008), hlm. 142.

<sup>3</sup> Anwar Kurnia, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII*, (Surakarta: Yudisthira, 2008), 80.

<sup>4</sup> Mukminan dan Endang Mulyani, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2014), 87.

<sup>5</sup> Sardiman AM dan Amurwani, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MA/MAK/SMA/MAK Kelas XI*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2014), 106.

<sup>6</sup> K. Mustarom, *Negara Islam Tanah Jawa; Cita-Cita Jibadis Diponegoro* (TKP: Syamina, 2014), 11.

latar belakang keagamaan (ada yang santri, bangsawan, birokrat, *gali jawara preman*, dan seterusnya).

Sebenarnya sebelum meletusnya peperangan terdapat beberapa peristiwa yang membuat Diponegoro meradang. Di antaranya adalah intervensi Belanda kepada keraton, pajak terhadap rakyat yang terlalu tinggi, merajalelanya kehidupan amoral di lingkungan istana karena pengaruh budaya barat, masalah lahan yang akan dibuat jalan, dan lain-lain. Semua probelamtika tersebut sebenarnya berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya Perang Diponegoro. Dari berbagai problematika sosial yang dianggap berpengaruh kepada terjadinya peperangan, penulis mencoba memfokuskan kajian atas kehormatan yang diperjuangkan Diponegoro dalam peperangannya terbatas kepada dua hal, yakni perjuangan hak asasi atas kepemilikan dan perjuangan atas agama. Pemilihan dua fokus tersebut bertujuan untuk meluruskan pandangan tidak proporsional yang sering terjadi dalam melihat penyebab perang Diponegoro sebagaimana kasus di atas. Kedua isu tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi terjadinya Perang Diponegoro. Dengan demikian, masalah utama dalam penelitian bisa dirumuskan dengan pertanyaan: bagaimana wujud pengaruh agama dan hak milik sebagai spirit perlawanan rakyat semesta selama Perang Diponegoro? Untuk mengupayakan proporsionalisasi pembacaan mengenai mengapa terjadinya peperangan, penulis menggunakan referensi dari naskah Babad Diponegoro hasil suntingan Tim Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penelitian Peter Carey (sejarawan Inggris) dan beberapa karya lain tulisan cendekiawan Indonesia.

## **B. KAJIAN TEORI**

### *Fungsi Sosial Agama*

Berbicara mengenai agama sebagai spirit perlawanan rakyat semesta selama Perang Diponegoro dalam penelitian ini, peneliti sedang mengkaji mengenai fungsi sosial agama. Artinya, peneliti sedang tidak menguji kebenaran doktrin agama. Tetapi, peneliti sedang melihat

bagaimana pemeluk agama sedang mempraktekkan pandangan keagamaannya sebagai suatu pandangan hidup (*weltanschauung*) dalam menjalani kehidupannya<sup>7</sup>.

Sebenarnya ada banyak sekali fungsi agama, di antaranya adalah sebagai edukatif, penyelamat, pendamaian, keyakinan yang tidak bisa ditawar dan fungsi sublimatif.<sup>8</sup> Di antara fungsi tersebut, fungsi agama yang digunakan sebagai subjek penelitian ini adalah fungsi sublimatif. Dengan fungsi ini, pemeluk agama tidak saja menggunakan ajaran agama sebagai usaha yang bersifat ukhrawi tetapi juga duniawi. Pemeluk agama akan menggunakan ajaran agama sebagai spirit melakukan perubahan sosial sehingga doktrin keagamaan digunakan sebagai sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi perekat hubungan sosial dan gerakan sosial.<sup>9</sup>

Perang Diponegoro merupakan salah satu gerakan sosial berupa peperangan yang dipimpin oleh Diponegoro dengan spirit keagamaan. Zakiya Darajat meringkas pendapat Carey tentang hubungan agama dan Perang Diponegoro. Menurut Zakiya, Carey berpendapat bahwa Diponegoro menamai perangnya sebagai Perang Sabil dengan motivasi agama untuk melawan penjajah dalam perang ini. Di samping itu, untuk mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin gerakan sosial, Diponegoro memakai gelar *Sultan Ngabdulkamid Heruwakra Kabirulmukminina Kalifatul Rasulullab Hamengkubuwono Senapati Ingalaga Sabilullah ing Tanah Jawa*.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 15.

<sup>8</sup> Ali Imron, "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat," *Jurnal Hikmah*, Vol. II, Nomor 1 Januari-Juni 2015, 23-39.

<sup>9</sup> Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 86.

<sup>10</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855*, Jilid II (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Koninlijk Institut voor Taal- Land- en Volkenkunde, 2008), hlm. 682-683. Lihat juga Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam", *Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan)*, Vol. 16, No. 1 (2016), 14.

Dalam hal ini, terdapat tulisan yang menganggap terjadinya Perang Diponegoro dipenuhi dengan mistisisme Islam.<sup>11</sup> Semangat keislaman dalam Perang Diponegoro sebenarnya tidak perlu diragukan karena sebenarnya elemen pasukan Diponegoro yang paling menonjol dalam peperangan adalah kaum santri. Peran santri sangat terlihat karena mereka mempunyai jaringan yang kuat di wilayah pedesaan sehingga bisa memobilisir rakyat jelata yang tinggal di pedesaan. Ini terutama terjadi di wilayah Kedu Banyumas.<sup>12</sup>

Semangat peperangan yang dilakukan Diponegoro ini tidak lepas dari kekecewaannya atas praktek keagamaan di keraton sebagai akibat dari pengaruh negatif Belanda. Keraton yang sejatinya merupakan sebagai pusat peradaban dalam melestarikan ajaran Islam, karena pengaruh budaya Belanda, justru dikooptasi dengan praktik yang menjurus kepada perilaku amoralitas.<sup>13</sup> Semangat untuk berperang ini sudah dimiliki Diponegoro sejak sengaja mengalienasi dirinya sendiri dari korupsi dan perilaku tak religius di istana. Alienasi yang dilakukan Diponegoro membawanya melakukan pengembaraan spiritual (*lelaman*) dengan melakukan kontak dengan Sunan Kalijaga dan Ratu Kidul, Dewi Laut Selatan. Dari kontak spiritual ini, dia merasa dituntut oleh tugas agung untuk membersihkan Jawa dari perilaku korup maupun praktek menyimpang dari agama melalui peperangan berdarah.<sup>14</sup>

Faktor keagamaan di balik terjadinya Perang Diponegoro ini merupakan fakta. Selanjutnya, fakta tersebut mendapat banyak perspektif pembacaan. Di antara yang punya kepentingan dengan ide negara Islam, memandang peperangan tersebut dilatarbelakangi

---

<sup>11</sup> Ajat Sudrajat, "Perang Diponegoro: Antara Gerakan Mahdisme dan Mistisisme Islam", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No 1, Tahun XVII, Pebruari 1998, 149-160.

<sup>12</sup> Akhmad Khoerul Fahmi, "Komunikasi Politik Santri Pengikut Diponegoro di Kedu Banyumas", *Prosiding Seminar Nasional FISIP UNSOED 2018*, 87-107.

<sup>13</sup> Verdy Firmantoro dkk, "Komunikasi Diponegoro dan *Post-Truth Era* Propaganda Klasik Jawa", *Jurnal Nomosleca*, Volume 4 Nomor 1, April 2018, 699.

<sup>14</sup> Testriono, "Islamisasi Jawa; Adaptasi, Konflik dan Rekonsiliasi", *Jurnal Studi Islamika*, Vol. 15, No. 2, 2008, 366.

semangat keislaman untuk berjihad mendirikan negara Islam.<sup>15</sup> Namun, ada pula yang memaknai bahwa semangat keislaman tersebut justru mengarah kepada gerakan nasionalisme. Dalam penelitian Yudian Wahyudi, semangat Perang Diponegoro telah mengilhami pengikutnya (setelah berakhirnya perang) untuk mendirikan pesantren. Kemudian, posisi pesantren ini digunakan sebagai markas para kyai untuk selalu mendengungkan cinta kepada negara sembari keyakinan suci untuk menolak Belanda.<sup>16</sup>

Di samping aspek keagamaan, sebenarnya penyebab perang tersebut yang paling kentara adalah karena adanya ide Belanda untuk memanfaatkan lahan Diponegoro sebagai jalan. Di sini sebenarnya, masalah pekarangan tersebut hanyalah akumulasi kekecewaan Diponegoro dan rakyat terhadap kebijakan yang menghisap kemakmuran rakyat. Dalam konteks kemakmuran rakyat jelata, hak milik ini tertransformasi menjadi pemungutan pajak yang terlalu tinggi. Kebijakan pajak yang mencekik ini pastinya mengancam hak kepemilikan masyarakat atas harta benda.<sup>17</sup>

Kedua hal tersebut telah digunakan Diponegoro dan para pimpinan perang untuk menarik simpati rakyat sehingga terciptalah Perang. Perang ini bisa dikatakan sebagai perlawanan rakyat semesta karena tulang punggung pasukan Diponegoro justru berasal dari rakyat biasa yang terdiri dari berbagai latar belakang. Satu penelitian mengenai strategi Perang Diponegoro mengatakan bahwa peperangan tersebut menggunakan beragam strategi. Salah satu strategi yang berhasil adalah

---

<sup>15</sup> K. Mustarom, *Negara Islam....* 11.

<sup>16</sup> Yudian Wahyudi, *Perang Diponegoro: Tremas, SBY dan Ploso* (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, 2012), hlm. 1-10. Pemikiran Yudian ini kemudian telah digunakan Yan Yan untuk menelisik nasionalisme dan semangat keilmuan di pesantren. Lihat Yan Yan Supriatman, "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur dan Yudian Wahyudi", *Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Volume I Nomor 1 April 2017*.

<sup>17</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid II. 545-559.

gerilya (*guerrilla war fare*).<sup>18</sup> Perang gerilya dalam bahasa militer konstitusional Indonesia disebut sebagai Perang Rakyat Semesta.<sup>19</sup> Selain itu, penamaan Perang Diponegoro sebagai Perang Rakyat Semesta karena kekuatan utama Diponegoro justru bukan berasal dari pasukan tentara keraton. Pasukan Diponegoro justru berasal dari rakyat jelata. Sebagai bukti keterlibatan rakyat jelata dalam peperangan tersebut, peninggalan logistik peperangan bisa ditemukan di Museum Sasana Wiratama.<sup>20</sup>

### C. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif telah digunakan dalam penelitian ini karena data yang dihasilkan adalah deskriptif yang berbentuk tulisan<sup>21</sup>. Fokus yang dijadikan subjek penelitian adalah penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library research*). Semua datanya diperoleh dari telaah literer atas Babad Diponegoro dan beberapa buku kredibel yang relevan dengan tema penelitian. Adapun sumber datanya dikategorikan menjadi dua macam yaitu primer dan sekunder. Sumber pertama adalah Babad Diponegoro Jilid 1-4. Babad ini telah disunting oleh Tim dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam Aksara Indonesia. Sumber sekunder adalah karya pakar mengenai Perang Diponegoro, di antaranya adalah karangan Peter Carey. Peneliti menamai buku Peter Carey sebagai kategori buku utama karena dia dia langsung merujuk kepada Babad Diponegoro. Selain itu, penulis juga telah mengambil beberapa bacaan yang relevan.

---

<sup>18</sup> Ubaidillah Zuhdi, dkk, “Aplikasi GMCR untuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Perang Diponegoro)”, *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol. 02; No. 02; 2010, 21.

<sup>19</sup> Ari Sapto, “Perang, Militer dan masyarakat: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan pengaruhnya pada Indonesia Kini”, *Jurnal Sejarah dan Budaya, Tabun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013*, 18.

<sup>20</sup> Asteria Herbani, “Peran Museum Sasana Wiratama Dalam Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta”, *Jurnal Historia*, Volume 11 No 2 Maret 2016, 75-77.

<sup>21</sup> Robert Bogdan and Steven. J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (USA: A Wiley-Interscience Publication, 1975), 3.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dengan metode ini, data berkaitan dengan subjek penelitian yang telah ditemukan berupa catatan, transkrip, buku dan catatan lainnya.<sup>22</sup> Dalam dokumentasi, peneliti telah menemukan banyak dokumen berjudul Babad Diponegoro. Dari berbagai dokumen, peneliti mendapati hanya Babad Diponegoro sebagai hasil suntingan Tim Perpustakaan Nasional saja yang bisa peneliti akses. Selain itu, dokumentasi ini juga diperlukan untuk memilah karya tentang Diponegoro yang relevan dan berbobot bagi penelitian ini. Di antara banyak karya mengenai Diponegoro, karya Peter Carey menjadi rujukan utama sebagai pembanding dalam membaca Babad Diponegoro.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Kaitannya dengan penelitian ini, analisis ini telah berhasil digunakan untuk mengungkap perilaku dan pemikiran seseorang tentang dirinya sendiri maupun orang lain dengan cara menganalisis atas apa yang mereka sampaikan di dalam buku.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, dengan menganalisis isi naskah Babad Diponegoro dan karya Peter Carey serta karya lainnya tentang Perang Diponegoro, maka peneliti telah mengungkap apa yang telah dialami Pangeran Diponegoro berkaitan dengan Perang Diponegoro bersama dengan apapun dan siapapun yang turut terlibat di dalamnya.

Dalam melakukan *content analysis* atas karya-karya berkaitan dengan Perang Diponegoro, tidak semua isi dalam bahan bacaan menjadi bahan analisis. Setelah mempertimbangkan kesesuaian masalah penelitian, peneliti menentukan unit kecil dalam isi buku yang relevan dengan penelitian agar mudah dianalisis. Unit-unit kecil ini merupakan fenomena menarik yang akan menjadi fokus penelitian, atau kalau dalam penelitian lapangan menjadi sampel penelitian.<sup>24</sup> Dalam prakteknya,

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 206.

<sup>23</sup> J. R. Fraenkel dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research*, (Singapore: Mc Graw Hill, 2007), 483.

<sup>24</sup> Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), 162-163.

peneliti mendapati buku-buku tentang Perang Diponegoro tersebut berbicara mengenai keadaan Jawa bagian tengah selatan, Diponegoro masa kecil, masa dewasa Diponegoro, dan bahasan lain yang tidak ada kaitannya dengan peperangan. Dengan *content analisis*, peneliti hanya mengambil bacaan yang berkaitan dengan peperangan saja.

Pelaksanaan *content analisis* tidak dilakukan dengan sembarangan. Pelaksanaannya memperhatikan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah proses analisis mengikuti aturan dan dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan kaedah, dan yang paling penting adalah setiap penarikan kesimpulan dari suatu pemikiran selalu selalu berpegang kepada isi dokumen.<sup>25</sup> Dari beberapa langkah tersebut, proses yang terberat adalah melakukan penarikan kesimpulan. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, peneliti harus menentukan tujuan khusus dalam penelitian ini. Yang dijadikan tujuan khusus adalah isu yang telah dibahas dalam latar belakang tersebut. Sehingga, tujuan khusus yang telah ditetapkan dalam penelitian adalah menjawab penyebab terjadinya Perang Diponegoro dilihat dari perjuangan membela hak milik dan agama.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### *Isu Agama sebagai Penggerak Motivasi Perang Diponegoro*

Persoalan agama merupakan beberapa titik simpul kronologi penyebab terjadinya perang Diponegoro. Dalam perang tersebut, Diponegoro memperjuangkan idealitas agama yang seharusnya menjadi simbol kehormatan keluarga kerajaan. Kedudukan agama Islam sebagai simbol kehormatan ini telah diawali oleh Hamengkubuwono I. Sebagai raja pertama, gelar yang dipakai Hamengkubuwono I adalah *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> D. Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 157.

<sup>26</sup> Ini adalah hasil penelitian Djoko Marihandono dalam disertasinya tentang Herman Willem Daendels, di Universitas Indonesia tahun 2005. Disertasi ini dibahas dalam Hendri F. Isnaeni, "Asal Usul Gelar Khalifatullah di Kesultanan Yogyakarta",

Cara yang ditempuh Diponegoro mengekspresikan krisis keagamaan keluarga keraton justru memilih sikap oposisi terhadap anggota keluarga lain. Dalam hal ini, dia lebih memilih untuk tinggal di luar keraton. Pilihan tempat tinggal ini mengisyaratkan ketidakbetahan Diponegoro tinggal di keraton karena suasana yang terlalu kental kontraproduktif dengan apa yang telah diteladankan oleh Hamengkubuwono I. Apa yang dirasakan oleh Diponegoro ini sebenarnya juga dirasakan oleh mending istri Hamengkubuwono I. Diceritakan bahwa Ratu Ageng tidak menyukai gaya hidup putranya, Sultan Kedua (HamengkubuwonoII), khususnya sikapnya yang tak acuh terhadap ibadah agama Islam. Tampaknya Sultan kedua jarang mengunjungi masjid raya, Masjid Ageng, tempat ibadah resmi para sultan Yogya. Dalam otobiografinya, Diponegoro merenungkan iklim keagamaan di Yogyakarta itu dan bagaimana banyak penduduknya mengabaikan patokan agama Islam. Secara khusus ia sangat mengecam tiga orang menantu Sultan Kedua, Raden Tumenggung Sumodiningrat, Raden Adipati Danurejo II, dan raden Ronggo Parwirodirjo III. Dalam babad karyanya, ia menggambarkan tiga orang ini sebagai pendosa tak terampuni.<sup>27</sup>

Semua krisis keagamaan di lingkungan keluarga keraton tersebut tidak lepas karena pengaruh Belanda. Kedatangan Belanda disebut-sebut menyebabkan adanya kebiasaan yang mengarah pada upaya menghilangkan sakralitas agama dalam kehidupan keraton. Diponegoro merasa kecewa terhadap luntarnya semangat keagamaan di lingkungan keluarga keraton. Sesuai dengan gelar yang disandang raja, siapapun rajanya seharusnya bertanggungjawab untuk menata penguatan kehidupan beragama di lingkungan keraton. Pilihan Diponegoro untuk tinggal di luar keraton menunjukkan bahwa di satu sisi Diponegoro sedang mengkritik anggota keluarga keraton yang sudah tidak konsisten melaksanakan ajaran Islam, tetapi di sisi lain

---

Historia, 08 Mei 2015. Link <https://historia.id/kuno/articles/asal-usul-gelar-khalifatullah-di-kesultanan-yogyakarta-voRIq> diakses 23 Juni 2019.

<sup>27</sup> Lihat Peter Carey, *Kuasa Ramalan...*Jilid I, 88-96.

sebenarnya dia sedang mengisyaratkan persiapannya menghimpun kekuatan untuk membersihkan pengaruh kebudayaan negatif dari Belanda di lingkungan keraton. Willem van Hogendrop menulis bahwa Diponegoro telah bersumpah untuk menata kembali keraton Yogyakarta dan mengusir para orang Eropa yang telah membawa kerusakan pada tatanan nilai kesalehan di lingkungan keraton.<sup>28</sup>

Dilihat dari budaya Jawa, tantangan yang dihadapi Diponegoro ini merupakan perjuangan untuk melaksanakan filosofi kebudayaan yang berbunyi “*mikul dhuwur mendhem jero*”. Filosofi ini berbicara mengenai keharusan keturunan dari siapaun tokoh untuk menjunjung tinggi keteladanan yang diwariskan kepadanya. Keraton Ngayogyakarta dengan gelar raja sebagai wakil Allah di bumi yang menata agama yang telah diwariskan Hamengkubuwono I merupakan warisan yang seharusnya dijaga oleh keluarga besar Hamengkubuwono dalam bentuk totalistik. Artinya, yang dipertahankan tidak hanya kedudukan rajanya, tetapi juga peran raja untuk menata agama. Ketika ternyata raja pada masanya tersebut kurang mampu melaksanakan warisan ini, Diponegoro memilih meninggalkan kehidupan keraton dan memilih menyiapkan kekuatan yang suatu saat digunakan untuk melawan kekuatan intervensi yang menyebabkan luntarnya kehidupan agama di keraton tersebut, yakni intervensi Belanda.

Krisis keagamaan di lingkungan istana ini pulalah yang menyebabkan Diponegoro melakukan keputusan yang tidak lazim bagi seorang Pangeran. Untuk menguatkan idealismenya, Diponegoro sengaja menolak diangkat menjadi Pangeran Mahkota. Penolakan ini bukan semata-mata timbul dari kecerobohan Diponegoro. Ini adalah hasil dari pengembaraan spiritual Diponegoro setelah menemui Ratu Kidul dan Sunan Kalijaga selama *lelono* di pantai Selatan. Dalam Babad Diponegoro versi Manado, Diponegoro menceritakan perjumpaannya dengan Ratu Kidul setelah beberapa waktu melakukan *semedi* di Gua Langse. Setelah perjumpaannya dengan Ratu Kidul, Diponegoro

---

<sup>28</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...*Jilid II, 454

bertemu dengan satu suara yang diyakininya sebagai suara Sunan Kalijaga. Dalam suara tersebut, Diponegoro diperintahkan mengubah nama agamisnya dari Ngabdurahim ke Ngabdulkamit. Diponegoro juga diperintahkan untuk mengawasi ayahnya, yang pada saat itu masih berstatus sebagai Putera Mahkota. Kemudian pada saat ayahnya telah dinobatkan menjadi Sultan, Diponegoro dilarang keras menerima gelar Pangeran Adipati Anom atau putera mahkota dari Belanda. Menurut suara tersebut, “karena hal itu jelas merupakan dosa”.<sup>29</sup>

Babad Diponegoro Versi Manado Jilid II Bagian 14 Sinom Bait ke-80-81 “*Lan maneh wewekas ing wang/marang sira Ngabdul Khamit/lam poma sira den yitna/lamun luput iku benjing/ramanira tan dadi/nanging ta wewekas ingsun/Ngbadul Khamit maring sira/ya gelem sira kinardi/ya Pangeran Dipati marang Welonda*”.<sup>30</sup>

Dalam peperangan, nafas perjuangan agama yang masuk ke dalam tubuh perjuangan Diponegoro dalam peperangan bisa dilihat dari berbagai narasi bahwa perang yang dilakukan Diponegoro adalah perang sabil. Semangat perang yang demikian pula yang sering dijumpai di dalam narasi yang menarasikan bahwa peperangan tersebut adalah dalam rangka melawan orang kafir<sup>31</sup>.

Narasi perjuangan agama dalam perang yang dilakukan Diponegoro ini memang terkadang disalahgunakan untuk melakukan pembecaan yang kontradiktif terhadap semangat moderatisme Diponegoro menghubungkan agama dan negara. Ada yang menilai Diponegoro ingin mendirikan negara Islam Mataram.<sup>32</sup> Pendapat ini apabila disandingkan dengan lingkaran kekuatan Diponegoro sebenarnya kelihatan tidak proporsional. Bahwa angkatan perang

---

<sup>29</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid I, hlm. 164-175. Peter Carey, *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java 1785-1855* (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde, 2007), 141-152.

<sup>30</sup> Komari dkk (Tim Penyunting), *Babad Dipanagara* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2010), 43.

<sup>31</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid II, 724.

<sup>32</sup> K. Mustarom, *Negara Islam Tanah Jawa; Cita-Cita Jihadis Diponegoro* (TKP: Syamina, 2014), 11.

Diponegoro tidak hanya mereka yang merupakan kelompok agamawan, tetapi juga banyak yang berasal dari bangsawan, rakyat jelata biasa, para jawara yang terbiasa menjadi kepala rampok dan kelompok sosial masyarakat biasa lainnya.<sup>33</sup> Memang Diponegoro menggunakan gelar Khalifatullah, tetapi gelar ini sebenarnya bukan jaminan ada narasi ingin membentuk negara Islam. Ajaran agama Islam yang diperjuangkan Diponegoro ini dalam kekuasaan negara ini masih toleran membiarkan hukum adat dan kebudayaan Jawa berlaku.

### *Isu Hak Milik sebagai Penggerak Perlawanan Rakyat Semesta Selama Perang Diponegoro*

Tegalrejo bukan merupakan tempat kediaman biasa bagi Diponegoro. Tempat ini bahkan menjadi alternatif pemerintahan yang mendapatkan legitimasi moral dari rakyat. Dikisahkan oleh Peter Carey bahwa kediaman Diponegoro tersebut adalah tempat untuk pengumpulan pajak. Melalui tempat itu pula Pangeran Diponegoro mengatur penarikan pajak kepada rakyat.<sup>34</sup> Inilah yang menyebabkan keputusan Keraton yang mendukung Belanda mengenai pembuatan jalan yang pada akhirnya memakan pekarangan Diponegoro sebenarnya terjadi tidak secara kebetulan. Keputusan tersebut hanyalah sarana untuk mengganggu kegiatan Diponegoro di Tegalrejo. Dengan memakan wilayah pekarangan Diponegoro, yang dirugikan tidak hanya Diponegoro, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kediaman Diponegoro. Mereka juga terkena imbas dari proyek Belanda tersebut. Kerugiannya ada yang terkena dampak langsung tanahnya kena proyek,

---

<sup>33</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid I, 118-119.

<sup>34</sup> Bisa dikatakan bahwa Diponegoro mempunyai pengikut sendiri yang sangat loyal kepada sistem pengelolaan tanah yang diatur dengan sistem sendiri oleh Diponegoro. Bahkan, mereka yang setia kepada Diponegoro juga membayar pajak kepada Diponegoro. Sehingga, diceritakan oleh Carey bahwa pada saat Diponegoro meninggalkan Tegalrejo tanggal 20 Juli 1825 karena peristiwa pengepungan oleh Belanda, Diponegoro meninggalkan f 3.000 uang kontan dan sejumlah besar padi, dan juga aneka barang pribadi yang satu di antaranya adalah cap resmi miliknya. Lihat Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid II, 713.

ada juga yang terganggu aksesnya karena tanah yang selama ini dilewati menjadi tertutup karena proyek jalan tersebut.

Secara kronologis, tragedi Tegalrejo terjadi disebabkan oleh adanya keputusan rencana Belanda membuat jalan yang menghubungkan Yogyakarta-Magelang. Kebetulan ternyata rute yang dipilih memakan pekarangan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pada 17 Juni 1825, jalan ini mulai dipasang pathok oleh para bawahan Patih danurejo IV. Mereka memasang pathok-pathok petunjuk pembuatan jalan di lahan Diponegoro. Pemasangan pathok ini tidak hanya merampas hak miliknya Diponegoro, tetapi juga telah membuat kerepotan Diponegoro dan para penduduk sekitar untuk menggunakan jalan. Pemasangan Pathok tersebut sama sekali tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Diponegoro dan keluarganya yang ada di Tegalrejo. Menurut Carey, kelancangan Patih ini merupakan kesengajaan. Pemasangan pathok ini berlangsung mulai Juni sampai dengan awal Juli 1825. Kejadian ini tidak hanya bisa dikatakan tidak pantas secara hukum, tetapi secara etika masyarakat Jawa juga sangat tidak pantas. Melihat kejadian demikian, Pangeran Diponegoro menjadi marah. Bagi Diponegoro, sebagaimana telah menjadi filosofi Jawa, tanah merupakan kehormatan. Dalam filosofi Jawa, terkenal ungkapan "*sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditobi pati*". Secara harfiah, semboyan ini berarti satu sentuhan dahi, satu jari (lebar)-nya bumi bertaruh kematian. Secara luas pepatah tersebut berarti satu sentuhan pada dahi dan satu pengurangan ukuran atas tanah (bumi) selebar jari saja bisa dibayar, dibela dengan nyawa (pati).

Dalam konteks perjuangan Diponegoro, filosofi ini berarti kalau diinjak harga dirinya, diganggu ketenteramannya akan bersatu melawan, meski memiliki keterbatasan. Diponegoro memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mencabuti pathok tersebut. Bahkan Diponegoro memerintahkan mengganti pathok tersebut dengan tombak. Penggantian tersebut menunjukkan sudah sangat marahnya Diponegoro dan bersiap melakukan perlawanan dalam bentuk apapun

–termasuk melakukan peperangan –dalam menghadapi pelaku dan aktor intelektual di balik pemasangan pathok tersebut.<sup>35</sup>

Melihat respon agresif yang ditunjukkan Diponegoro akhirnya Residen Belanda di Yogyakarta memerintahkan satu batalyon pasukan untuk melakukan penangkapan Diponegoro di Tegalrejo. Pasukan tersebut mengepung kediaman Diponegoro. Diponegoro yang dicari akhirnya berhasil meloloskan diri. Setelah berhasil melarikan diri, Belanda dan Pasukannya Danurejo membumi-hanguskan kediaman Diponegoro di Tegalrejo. Kejadian inilah yang meletupkan bara api peperangan, sehingga Diponegoro dan pengikutnya merasakan bahwa perlawanan mereka terhadap Belanda adalah dalam rangka menjaga hak miliknya. Pembumi-hangusan kediaman Diponegoro di Tegalrejo hanyalah merupakan simbol awal kezhaliman yang dilakukan Belanda. Kezhaliman mereka sangat kentara sekali dalam peristiwa yang terjadi di Tegalrejo. Rasa sepenanggungan terhadap apa yang dialami Diponegoro secara cakupan kekeluargaan (pembakaran kediaman) tersebut akhirnya menjadi rasa perjuangan dari kezhaliman secara global.

Dalam logika sederhanya, apa yang terjadi di kediaman Diponegoro tersebut hanyalah salah satu bentuk kezhaliman. Karena kedudukan Diponegoro, penderitaan yang dialami Diponegoro merupakan penderitaan yang juga dialami oleh rakyat. Oleh sebab itu, membalaskan atas penderitaan yang dialami Diponegoro merupakan jalan membebaskan rakyat Jawa dari penderitaan. Jadilah masalah yang dialami Diponegoro (berupa perampasan pekarangan dan pembumi-hangusan kediaman) merupakan masalah bersama. Oleh sebab itu, isu ini dengan mudah menyebar kepada jaringan Diponegoro dan tokoh-tokoh yang berpihak kepada Diponegoro didaerah untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Inilah salah satu kunci mengapa Diponegoro bisa menggerakkan pasukan dari rakyat biasa. Kekuatan pasukan Diponegoro bukan berasal dari tentara keraton. Pasukannya

---

<sup>35</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...*Jilid II, 704.

justru merupakan gabungan kyai, santri, penghulu, jawara, dan beberapa bangsawan internal keraton yang berpihak kepada Diponegoro.

Secara teoritis mengapa persoalan keluarga bisa menjadi persoalan negara apabila akan dijelaskan maka bisa menggunakan dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah karena persoalan legitimasi kekuasaan yang diterima oleh Diponegoro dari rakyat. Kedua adalah fungsi sosial dan bahkan politik atas *property* (tanah, pekarangan dan perumahan) yang dimiliki oleh Diponegoro. Alasan mengapa Diponegoro mendapat legitimasi kepemimpinan yang kuat dari rakyat Jawa adalah karena faktor kekeluargaan. Sebagai pewaris keturunan darah biru, kepemimpinan Diponegoro tidak perlu diragukan lagi. Kalau Diponegoro bernafsu menjadi raja, keinginan ini tidaklah sulit karena sebenarnya Diponegoro sendiri yang pernah menolak diangkat menjadi putra Mahkota dan Raja. Berbekalkan keturunan tidaklah mudah bagi Diponegoro untuk menata kehidupan rakyat yang berada di Tegalrejo.

Seni kepemimpinan alami Diponegoro ini juga berhasil menarik daerah lain (tidak hanya Tegalrejo) untuk menjadi satu kepemimpinan dengan Diponegoro. Sehingga pada saat itu, keberhasilan kepemimpinan Diponegoro ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah yang menyetorkan pajaknya kepada Diponegoro. Sanad geneologis kepada kekuasaan yang dimiliki Diponegoro tersebut ditambah lagi dengan sikap merakyat Diponegoro terhadap masyarakat kalangan rakyat jelata. Perpaduan antara geneologis sebagai bangsawan dengan watak kharismatik kepada rakyat jelata demikian benar-benar telah menjadi modal sosial utama bagaimana rakyat begitu terpesona dan menaruh harapan besar kepada Diponegoro.

Alasan kedua mengenai fungsi *property* yang menjadi salah satu sasaran penjajahan Belanda. Baik Diponegoro maupun masyarakat sedang menghadapi masalah yang sama, yakni terancamnya *property* mereka dari penjajahan Belanda. Kalau masalah kentara yang dihadapi Diponegoro adalah pengambilan lahan, sementara masalah kentara yang dihadapi rakyat adalah tingginya beban pajak karena ulah penjajahan oknum keraton, Belanda dan beberapa oknum China. Inilah yang

semakin menguatkan tekad rakyat untuk ikut bersama dalam peperangan ini.

Dalam konstruksi sosial pada masa itu yang penuh dengan ketimpangan dan penyalahgunaan kepada rakyat kecil, saat itu, masyarakat sangat mengharapkan kehadiran seorang ratu adil. Diponegoro dengan berbekal kepada perpaduan karakter ideal di atas telah menjelma sebagai harapan baru masyarakat untuk menjadi ratu adil. Harapan inilah yang memudahkan Diponegoro mendapat simpati dari masyarakat dan kemampuan menghimpun kekuatan rakyat semesta.<sup>36</sup>

Dalam peperangan, sebenarnya perangnya tidak hanya terjadi antara pasukan Diponegoro melawan Belanda, tetapi juga penyerbuan pasukan Diponegoro kepada keraton dalam rangka memadamkan dukungan keraton kepada Belanda. Diponegoro ingin membuktikan penyerangan ini sebagai pertanda bahwa yang diserang adalah kemungkaran yang terdapat di Istana. Keraton saat itu menjadi sarang bangsawan yang justru tidak berpihak kepada rakyat. Keraton hanyalah menjadi alat Belanda untuk melegitimasi kebijakannya yang menyengsarakan rakyat. Para pejabat keraton tidak ubahnya merupakan kaki tangan kepanjangan Belanda untuk melanggengkan penindasan kepada warga pribumi. Oleh sebab itu, dalam penyerangan tersebut, Pasukan Diponegoro juga melakukan perusakan kepada rumah para bupati (tumenggung) yang berpihak kepada Belanda. Selain perusakan, pasukan juga melakukan penjarahan kepada gudang-gudang logistik dan mengangkutnya ke luar kota. Penjarahan ini telah mengakibatkan sebagian besar penduduk Yogyakarta menderita kekurangan bahan makanan. Menyerbu nagara (Keraton Yogyakarta) dan mengisolasi untuk mencegah datangnya pasukan bantuan dari luar Yogyakarta.<sup>37</sup> Selain perlawanan atas oknum keraton yang tidak

---

<sup>36</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid II, 685-694.

<sup>37</sup> Peter Carey, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), 39

berpihak kepada rakyat, perang Diponegoro juga menyebabkan sentiment kebencian kepad etnis Eropa dan China.<sup>38</sup>

## **KESIMPULAN**

Agama merupakan salah satu faktor yang telah digunakan Diponegoro untuk menghimpun kekuatan rakyat semesta (dari berbagai lapisan) untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Isu agama ini sebenarnya tidak digunakan oleh Diponegoro untuk mendirikan negara Islam. Kalaupun ada semangat peperangan karena memperjuangkan ajaran Islam memang bisa ditemukan, tetapi perjuangan tersebut lebih diorientasikan untuk mengobati kekecewaan Diponegoro atas dampak negatif dari Belanda atas intervensinya kepada kehidupan keraton dan masyarakat. Di antara dampak negatifnya adalah kehidupan amoral dan lain-lain. Aspek agama yang digunakan adalah unsur substansi perlawanan kepada kezhaliman dan praktek amoralitas yang merendahkan kehormatan itu sendiri.

Isu hak milik merupakan salah satu simpul yang juga mempengaruhi perang Diponegoro. Tetapi yang perlu dilihat bukan semata-mata karena itu pekarangan. Tanah dalam budaya Jawa mempunyai nilai kehormatan. Itulah sebabnya dalam budaya Jawa dikenal adanya filosofi “sadumuk bathuk, sanyari bumi, ditohi pati”. Di samping itu, persoalan hak milik yang diperjuangkan Diponegoro ini bertransformasi menjadi kemakmuran versus pemerasan. Kemakmuran akan didapatkan rakyat apabila penguasa tidak melakukan pemerasan. Faktanya, sebelum perang Diponegoro memang pihak istana yang bersekongkol dengan Belanda dan beberapa oknum China melakukan pemerasan kepada rakyat melalui mekanisme pajak. Inilah bagian dari hal yang memicu terjadinya perlawanan rakyat semesta.

---

<sup>38</sup> Peter Carey, *Kuasa Ramalan...* Jilid II, 726-732.

### **Keterangan Tambahan**

Tulisan ini merupakan pengembangan hasil penelitian Kelompok Pembinaan dengan Judul *Perang Diponegoro dan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta* yang dibiayai oleh dana BOPTN Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Adapun penelitiannya adalah Faiq Tobroni sebagai Ketua dan Fatma Amilia sebagai Anggota. Penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga yang telah memfasilitasi penelitian ini, serta kepada Ilya Haizatin Shofwana (16730111) mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu proses penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AM, Sardiman dan Amurwani, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MA/MAK/SMA/MAK Kelas XI, (Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2014).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).
- Bogdan, Robert and Steven. J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods* (USA: A Wiley-Interscience Publication, 1975).
- Carey, Peter *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa 1785-1855, Jilid II* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerjasama dengan Koninlijk Institut voor Taal- Land- en Volkenkunde, 2008).
- Carey, Peter. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986).
- Carey, Peter. *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java 1785-1855* (Leiden: Koninlijk Institut voor Taal- Land- en Volkenkunde, 2007).
- Darajat, Zakiya. “Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep dan Praktik Jihad dalam Sejarah Islam”, *Jurnal Ijtihad (Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan)*, Vol. 16, No. 1 (2016).
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011).
- Fahmi, Akhmad Khoerul. “Komunikasi Politik Santri Pengikut Diponegoro di Kedu Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional FISIP UNSOED 2018*.
- Firmantoro, Verdy. dkk, “Komunikasi Diponegoro dan Post-Truth Era Propaganda Klasik Jawa”, *Jurnal Nomosleca*, Volume 4 Nomor 1, April 2018.
- Fraenkel, J. R. dan Norman E. Wallen, *How to Design and Evaluate Research*, (Singapore: Mc Graw Hill, 2007).

- Herbani, Asteria. "Peran Museum Sasana Wiratama Dalam Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta", *Jurnal Historia*, Volume 11 No 2 Maret 2016.
- Imron, Ali. "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat, "Jurnal Hikmah", Vol. II, Nomor 1 Januari-Juni 2015.
- Isnaeni, Hendri F. "Asal Usul Gelar Khalifatullah di Kesultanan Yogyakarta", *Historia*, 08 Mei 2015. Link <https://historia.id/kuno/articles/asal-usul-gelar-khalifatullah-di-kesultanan-yogyakarta-voRLq> diakses 23 Juni 2019.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010).
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Komari dkk (Tim Penyunting), *Babad Diponegoro* (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2010).
- Kurnia, Anwar . *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII*, (Surakarta: Yudisthira, 2008).
- Memory Of The World Register. 2012-49. Babad Diponegoro or Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro (1785-1855). A Javanese nobleman, Indonesian national hero and pan-Islamist. (Indonesia and The Netherlands). Memory Of The World Register. 2012-49. Babad Diponegoro or Autobiographical Chronicle of Prince Diponegoro (1785-1855). A Javanese nobleman, Indonesian national hero and pan-Islamist. (Indonesia and The Netherlands). Alamat <http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/babad-diponegoro-or-autobiographical-chronicle-of-prince-diponegoro-1785-1855-a-javanese-nobleman-indonesian-national-hero-and-pan-islamist/> diakses 31 Oktober 2018 pukul 14.15 WIB.

- Mukminan dan Endang Mulyani, Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTs/SMP Kelas VIII, (Jakarta: Pusat Perbukuan Kemendikbud, 2014).
- Mustarom, K. Negara Islam Tanah Jawa; Cita-Cita Jihadis Diponegoro (TKP: Syamina, 2014).
- Sapto, Ari. “Perang, Militer dan masyarakat: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan pengaruhnya pada Indonesia Kini”, Jurnal Sejarah dan Budaya, Tahun Ketujuh, Nomor 1, Juni 2013.
- Satori, D. dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sudrajat, Ajat. “Perang Diponegoro: Antara Gerakan Mahdisme dan Mistisisme Islam”, Jurnal Cakrawala Pendidikan, No 1, Tahun XVII, Pebruari 1998.
- Supriatman, Yan Yan. “Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur dan Yudian Wahyudi”, Jurnal Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, Volume I Nomor 1 April 2017.
- Susilaningsih, Endang. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MI/SD Kelas 5 (Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas, 2008).
- Testriono, “Islamisasi Jawa; Adaptasi, Konflik dan Rekonsiliasi”, Jurnal Studi Islamika, Vol. 15, No. 2, 2008.
- Wahyudi, Yudian. Perang Diponegoro: Tremas, SBY dan Ploso (Jakarta: Deputy Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, 2012).
- Zuhdi, Ubaidillah. dkk, “Aplikasi GMCR untuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Perang Diponegoro)”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik”, Vol. 02; No. 02; 2010.